

BAB II

HUBUNGAN KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA

MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH

Indonesia dalam menjalani hubungan bilateral dengan Amerika Serikat mengalami pasang surut, semenjak pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh berbagai hal mulai dari pandangan para perumus kebijakan luar negeri terhadap ancaman dari luar negeri hingga kondisi sosial politik domestik. Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penting bagi kebijakan politik luar negeri, karena Indonesia secara geografis dan geopolitik terletak dalam kawasan yang strategis serta dianggap memiliki peran penting dalam komunitas ASEAN.

Pada masa pemerintahan Soekarno hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat tidak menunjukkan hubungan yang baik karena Soekarno menganggap Amerika Serikat adalah sebagai wujud dari imperialisme nyata. Amerika Serikat merupakan wujud imperialisme juga dilihat sebagai ancaman, tidak hanya ditinjau dari pembukaan undang-undang yang mengecam imperialisme atau kolonialisme tetapi juga pribadi Soekarno sebagai *founding father* yang memiliki sentiment negatif terhadap imperialisme secara pribadi. Selain itu saat pada masa awal kemerdekaan Indonesia dihadapkan dengan kenyataan dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur, dengan kebijakan politik luar negeri Non-blok Indonesia secara otomatis mengisolasi diri dari Amerika Serikat.¹²

¹² Smith, Anthony L, 2003. "*A Glass Half Full: Indonesia-US Relations in the Age of Terror*", dalam *Contemporary Southeast Asia*, 25 (3): 451

Pada masa pemerintahan Soeharto, negara Amerika Serikat justru dianggap sebagai kunci kesuksesan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia lebih cenderung pro western dan mengabaikan kebijakan Non-Blok. Namun, kritik terhadap permasalahan hubungan Indonesia dengan Timor-Timur menjadikan hubungan Indonesia dan Amerika memburuk pada tahun 1990an.¹³ Pada masa B.J. Habibie, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat masih pada titik yang belum aman. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat tersebut, masih terkendala dalam masalah Timor-Timur.¹⁴ Ketika konflik di Timtim tahun 1999, Amerika Serikat mulai melakukan embargo pembelian senjata dan suku cadang terhadap Indonesia. Saat itu, pemerintah Indonesia berniat untuk memulihkan kerja sama militer, khususnya dalam rangka pembelian suku cadang dan persenjataan dari Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat mengajukan sejumlah syarat, antara lain Indonesia harus memberikan sanksi terhadap orang-orang yang dinilai terlibat dalam kasus Timor Timur (Timtim).

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia masih relatif memanas. Hal ini disebabkan karena sikap dari Gus Dur mengecam tindakan Amerika Serikat mengenai masalah Iraq.¹⁵ Dengan munculnya berbagai macam gerakan masyarakat Indonesia yang memboikot produk-produk Amerika Serikat telah cukup membuktikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat masih dalam keadaan yang tidak saling mendukung.

¹³ Ibid., hlm. 452

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

A. Kebijakan Politik Luar Negeri George W. Bush terhadap Indonesia

Naiknya George W. Bush dari partai politik yang lebih condong kepada unilateralis pada Januari 2001 telah membuka era baru dalam partai luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya dijabat oleh Bill Clinton dari Partai Demokrat yang cenderung bersifat multilateralis. Politik multilateralis seperti yang telah ditunjukkan oleh Clinton lebih mengedepankan pada nilai-nilai kerjasama dan diplomasi internasional untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat di dunia. Berbeda dengan multilateralis, politik unilateralis era George W. Bush cenderung mengandalkan cara-cara militer untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat dan menjaga hegemoninya di dunia untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai pax Americana, semacam pemerintahan dunia dimana Amerika Serikat sebagai pemimpin Negara-negara dunia.

Hingga pada satu kesempatan Presiden George W. Bush dan Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali era baru kerjasama bilateral di antara kedua negara demokrasi terbesar dan meninjau kembali nilai-nilai serta tantangan bersama yang mengikat hubungan persahabatan di antara mereka. Mereka menyambut baik kemajuan pesat yang dicapai dalam rangka mengimplementasikan Pernyataan Bersama tahun 2001. Mereka juga menyatakan kepuasan atas terus berkembang dan semakin kuatnya hubungan antara kedua negara demokrasi tersebut. Presiden Megawati menekankan pentingnya kunjungan Presiden Bush, mengingat ia merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Indonesia sejak tahun 1994. Presiden Bush menyatakan dukungan yang kuat dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap transisi demokrasi dan reformasi Indonesia, serta menyambut baik kemajuan yang dicapai menuju ke arah demokrasi yang matang dan stabil. Kedua

Presiden sepakat bahwa sebagai negara berpenduduk Muslim yang terbesar di dunia, Indonesia merupakan contoh yang menonjol dimana demokrasi dan Islam dapat berjalan seiring.

Presiden Bush mencatat pemulihan yang substansial dari ekonomi Indonesia pada tahun-tahun terakhir dan menjanjikan dukungan bagi kelanjutan pembangunan Indonesia sehubungan dengan berakhirnya dengan sukses program khusus dengan IMF akhir tahun ini. Presiden Bush menghargai komitmen Presiden Megawati untuk terus melanjutkan reformasi ekonomi yang tidak mudah, memberantas praktek-praktek KKN serta memperbaiki iklim investasi. Kedua Presiden sepakat bahwa hubungan perdagangan dan investasi kedua negara yang telah berlangsung lama menunjukkan keuntungan dari sistem perdagangan terbuka bagi pembangunan di Indonesia. Amerika Serikat merupakan pasar terbesar bagi ekspor non minyak dan gas Indonesia, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merupakan investor utama di Indonesia.

Presiden Bush dan Presiden Megawati menegaskan kembali bahwa reformasi militer merupakan unsur yang penting dalam transisi Indonesia menuju demokrasi yang matang dan stabil. Kedua Presiden sependapat bahwa hubungan militer yang normal merupakan kepentingan kedua negara dan setuju untuk terus berupaya guna mencapai tujuan tersebut. Presiden Megawati menyambut baik dukungan Amerika Serikat bagi upaya-upayanya untuk mengembangkan hubungan sipil-militer yang selayaknya dalam bentuk International Military Education and Training (IMET) serta Regional Defense Counter Terrorism Fellowship. Kedua Presiden sepakat mengenai perlunya peningkatan hubungan sipil-militer dan menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kedua Presiden menyambut baik suksesnya penyelenggaraan Dialog Keamanan Indonesia-AS yang pertama di Jakarta pada bulan

April 2002. Mereka sepakat bahwa Dialog yang kedua akan dilaksanakan di Washington, DC awal tahun 2003.

Kedua Presiden menyatakan duka cita atas pembunuhan dua warganegara Amerika dan seorang Indonesia oleh orang bersenjata tak dikenal di dekat Timika, Papua, pada bulan Agustus 2002. Mereka mencatat bahwa investigasi gabungan antara Polri, TNI dan FBI telah berjalan baik. Mereka menegaskan kembali komitmen bersama untuk menemukan para pembunuhnya dan membawa mereka ke pengadilan, siapapun pelakunya. Presiden Bush menghargai keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam perang melawan terorisme, termasuk penangkapan dan pengadilan para pelaku yang bertanggung jawab atas pemboman di Bali, serta upaya yang terfokus dalam mengungkap jaringan teroris. Kedua Presiden sependapat bahwa terorisme merupakan ancaman yang berkelanjutan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan bertekad untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam perang melawan terorisme, termasuk melalui pengembangan kemampuan (*capacity-building*) dan pertukaran informasi. Kedua Presiden menolak pengkaitan antara terorisme dengan agama. Kedua Presiden setuju bahwa serangan teroris terhadap warga sipil yang tidak berdosa tidak mungkin dapat dibenarkan. Mereka menekankan bahwa terorisme merupakan pelanggaran terhadap kebenaran ajaran semua agama dan sepakat untuk bekerja bersama guna meningkatkan dialog antar agama di negara mereka dan di luar negeri. Presiden Bush menggarisbawahi bahwa perang melawan terorisme bukan merupakan perang terhadap Islam dan menyatakan kekaguman serta penghargaan yang besar kepada sejarah panjang toleransi beragama serta paham Islam yang moderat di Indonesia.

Presiden Bush mengumumkan program senilai US\$ 157 juta untuk jangka waktu 6 tahun yang dirancang untuk membantu usaha Indonesia meningkatkan

kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Inisiatif baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tinggi, melalui bantuan kepada orang tua, pemerintah daerah dan organisasi-organisasi Islam dalam rangka usaha mereka untuk memberikan kepada para pelajar Indonesia kesiapan yang diperlukan guna menghadapi persaingan di kancah ekonomi global.

Presiden Bush menekankan dukungan kuat bagi integritas wilayah serta kesatuan nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia yang bersatu, stabil, sejahtera dan demokratis dapat menjadi contoh sebuah transisi demokrasi yang sukses bagi dunia. Presiden Bush menegaskan bahwa Amerika Serikat menentang gerakan pemisahan diri di wilayah manapun di Indonesia dan menghimbau kelompok separatis di Aceh dan Papua agar memperjuangkan tuntutan mereka melalui cara politis yang damai. Selanjutnya ia menyatakan harapan bahwa Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses politik atas dasar otonomi khusus dalam usaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Presiden Bush juga memuji upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik komunal melalui penegakan hukum, penghormatan atas HAM, dialog dan rekonsiliasi.

Presiden Bush dan Presiden Megawati membahas berbagai isu regional. Presiden Bush menyampaikan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003, serta menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya mewujudkan *ASEAN Security Community*. Presiden Bush menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan Indonesia dan semua negara di kawasan untuk meningkatkan keamanan, stabilitas serta kemajuan di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Kedua Presiden menyatakan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan aksi terorisme dan kekerasan yang terus berlangsung di Timur Tengah, yang sejauh

ini telah menelan banyak korban jiwa yang tidak berdosa. Mereka menyatakan dukungan kuat atas visi yang diartikulasikan oleh Presiden Bush tanggal 24 Juni 2002, yaitu negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan “*viable*” pada tahun 2005, yang hidup secara damai dan aman berdampingan dengan negara Israel yang aman pula. Kedua presiden sepakat bahwa semua pihak di Timur Tengah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif dan adil, dan bahwa mengakhiri kekerasan harus diberikan prioritas tertinggi.

Presiden Bush, didampingi oleh Presiden Megawati, juga telah bertemu dengan para tokoh agama Islam yaitu KH Hasyim Muzadi, Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia Natan Setiabudi dan tokoh agama Hindu Ida Pedanda Gede Made Gunung. Pada pertemuan tersebut, Presiden Bush menyampaikan penghormatan yang tinggi atas toleransi beragama, sikap moderat serta komitmen terhadap demokrasi di Indonesia. Para tokoh agama memberikan penjelasan kepada Presiden Bush mengenai Islam serta keselarasan budaya dan agama di Indonesia serta menyampaikan pandangan mereka mengenai permasalahan-permasalahan masa kini, seperti situasi di Timur Tengah, Irak dan Afghanistan. Semua pihak sepakat mengenai pentingnya upaya untuk memerangi terorisme internasional. Kedua presiden beranggapan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang dibangun atas dasar saling menghormati dan kemitraan yang sejajar merupakan kepentingan nasional kedua negara. Mereka bertekad untuk memperdalam serta memperkuat hubungan yang penting ini dan bekerjasama guna mewujudkan perdamaian serta kemakmuran dunia.¹⁶

Dengan adanya peristiwa 11 September 2001 bagi Amerika seolah-olah menjadi suatu alasan dasar pembenaran bagi seluruh sepak terjang politik Amerika

¹⁶ <http://kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=80&l=id> akses tanggal, 16 Februari 2013

Serikat dalam upayanya memberantas terorisme, seperti langkah Amerika dalam menginvasi Afghanistan dan Irak yang sebenarnya tindakan tersebut banyak ditentang dan dikecam oleh banyak negara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar juga ikut merasakan dampak perubahan politik luar negeri Indonesia pasca runtuhnya gedung kembar WTC. Politik luar negeri Bush yang sangat gigih dalam memberantas teror, memberikan tekanan yang besar terhadap Indonesia.

George W. Bush menggunakan kebijakan teror sebagai tolak ukur hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dan kebijakan inilah yang membuat ketegangan yang menimbulkan berbagai gejolak politik di Indonesia. George W. Bush yang dilanda kemarahan luar biasa pasca tragedi 11 September 2001, kemudian mengeluarkan serangkaian pernyataan tentang perang melawan terorisme dan menuduh Osama bin Laden berada dibalik peristiwa tersebut. George W. Bush menyerukan perang melawan terorisme dan menuntut semua negara di dunia untuk mengutuk terorisme. Sedangkan bagi negara-negara yang tidak bersedia mengikuti ajakannya ia mengancam agar berhati-hati.¹⁷

Perubahan drastis arah kebijakan luar negeri George W. Bush ini bagaikan langit runtuh bagi bangsa Indonesia. pemerintahan Indonesia yang semula berharap hubungan dengan Amerika Serikat akan bertambah baik sama sekali tidak siap dengan perubahan total arah diplomasi George W. Bush terhadap Indonesia. Indonesia dihadapkan pada dua pilihan sulit antara mendukung kampanye Bush melawan terorisme atau dikucilkan dari pergaulan internasional.¹⁸

¹⁷ DR. Bambang Cipto, M.A, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia, Kajian atas kebijakan Luar Negeri Clinton terhadap Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 hal. 334

¹⁸ *Ibid.* hal. 335

Bagi Indonesia, kampanye melawan terorisme ini merupakan malapetaka yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di Indonesia. delapan tahun Indonesia terus menerus ditekan Amerika Serikat karena kasus Timor-Timor.¹⁹ Sejak tahun 2001 Indonesia kembali ditekan karena kampanye terorisme yang dilancarkan George W. Bush. Hingga satu tahun sejak tragedi 11 September Indonesia masih segan memenuhi keinginan pemerintah Amerika Serikat. Sikap Indonesia yang lamban cukup mencolok karena Philipina dan Malaysia sangat sigap dalam menanggapi kebijakan teror.²⁰ Persoalannya adalah bahwa kali ini pemerintah Indonesia harus menangkap tokoh-tokoh umat Islam yang dikategorikan sebagai teroris oleh Amerika Serikat. Padahal pemerintahan Megawati sedang mempersiapkan diri menuju pemilihan presiden tahun 2004. Penangkapan sewenang-wenang diperkirakan akan merugikan citra Megawati di mata pemilih umat Islam. Itulah sebabnya Megawati maupun petinggi TNI memilih untuk tidak terburu-buru memenuhi keinginan pemerintah George W. Bush karena tindakan buru-buru akan merugikan kalkulasi politik mereka menjelang pemilihan presiden 2004.²¹

Presiden George W. Bush kurang berminat mempertimbangkan kalkulasi domestik tersebut dan tetap konsisten dengan kampanye anti-terornya. Sebagai akibatnya, pemerintah Megawati terus-menerus menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pemerintahan George W. Bush. Puncak tekanan ini semakin tak terhindarkan dengan meledaknya Bom Bali yang mau tak mau memaksa pemerintah Megawati untuk segera mengambil tindakan tegas.²² Penangkapan ustadz Ba'asyir yang dramatis menjadi awal sikap pemerintah Megawati yang cenderung semakin represif. Serangkaian penangkapan lainpun segera dilakukan untuk membuktikan bahwa

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid* hal. 336

²² *Ibid*

Indonesia benar-benar serius dalam menangani kasus teror. Sudah barang tentu tindakan pemerintah ini menimbulkan reaksi penolakan dari publik Islam Indonesia. selama beberapa minggu kritik dan kecaman dilontarkan beberapa kalangan Islam dan kelompok kritis lain di Indonesia terhadap apa yang dianggap sebagai tekanan Amerika Serikat terhadap umat Islam. Namun tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan publik tidak ditanggapi sepenuhnya oleh pemerintah Megawati mengingat besarnya tekanan Internasional terhadap Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono kepada publik pasca Bom Bali.²³

Pergantian pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudoyono diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap hubungan Amerika Serikat-Indonesia. Harapan ini didukung oleh pernyataan Deputy Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, Eric G. John. John mengatakan, "Keberhasilan di Indonesia pada pemilu nasional tahun 2004 dan bersama bantuan Amerika terhadap gempa bumi dan tsunami yang tragis di Indonesia telah membuka kesempatan untuk hubungan Amerika Serikat-Indonesia."²⁴

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam hal demokrasi, memerangi terorisme, dan ekstremisme, reformasi ekonomi, reformasi pelayanan keamanan, dan penyelesaian konflik secara damai, menguatkan kesempatan memperbaiki hubungan Amerika Serikat-Indonesia. "Kami memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan dalam hubungan kita dengan negara mayoritas Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga. Jika kita berhasil, itu akan memiliki efek yang luas pada kepentingan

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://www.america.gov/st/washfile-english/2005/September/20050915164234TJkcolluB0.6488306.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010

kita dengan Indonesia dan seluruh dunia”, kata John.²⁵ John juga mengucapkan selamat atas keberhasilan pemerintah Indonesia yang telah berhasil menangkap lebih dari 130 teroris yang telah berhasil ditangkap sejak Bom Bali pada bulan Oktober 2002.

Tetapi,” ucapan selamat” yang dilakukan oleh pemerintah Amerika tidak semata-mata menghilangkan tekanan yang dilancarkan oleh George W. Bush terhadap pemberantasan teroris di Indonesia. Dalam Konferensi negara-negara Asia Pasifik (APEC) saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu George W. Bush salah satu perkara yang dominan adalah peningkatan kerjasama keamanan, khususnya militer. Bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa sejatinya forum APEC lebih banyak berbicara tentang ekonomi dan pembangunan para anggotanya tapi bergeser menjadi tema ‘terorisme’, hal ini menunjukkan keamanan dan terorisme menjadi kata kunci politik Ameika Serikat. Termasuk politiknya di Indonesia. Berdasarkan hal ini maka setiap kebijakan dan kerjasama dengan Amerika Serikat akan senantiasa mempersyaratkan keamanan dalam kaitannya dengan isu terorisme yang sudah didefinisikan Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak setuju dengannya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan hal-hal ini terjadi:

1. Selat Malaka merupakan jalur strategis di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Beberapa bulan lalu sekutu AS Singapura meminta pasukan AS untuk mengamankan Selat tersebut. Pemerintah AS, khususnya Pentagon, menginginkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendukung upaya Amerika Serikat dan negara sekutunya untuk melakukan internasionalisi Selat Malaka dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan.

²⁵ *Ibid.*

2. Pihak Amerika Serikat tampaknya ingin sekali melihat reformasi juga terjadi secara prinsipil dalam organisasi TNI. Mereka meminta Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memelopori upaya penghapusan fungsi teritorial TNI dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahannya. Mereka juga mendesak agar kekuatan TNI-Laut, yaitu Armada Timur dan Barat, dilebur dan dihapuskan menjadi komando utama saja yang berpusat di Jakarta. Mereka juga konon meminta Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono membentuk badan baru di bidang intelejen kepolisian (semacam FBI) dengan berintikan anggota Detasemen 88 yang sebelumnya telah dididik FBI untuk penanggulangan terrosime global. Bila ini benar-benar terjadi maka dari segi pertahanan, Indonesia makin lemah; sementara dari segi keamanan dalam arti 'perang melawan terorisme' pengaruh AS semakin besar.²⁶

B. Hubungan Kerjasama Ekonomi, Politik, dan Militer Amerika Serikat dengan Indonesia Masa George W. Bush

1. Kerjasama di Bidang Ekonomi

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan yang luas pada politik, strategis dan komersial hubungan ekonomi. Berdasarkan kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia dan berbagi nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, ada komitmen yang kuat dari kedua belah pihak yang nyata untuk meningkatkan hubungan bilateral, termasuk dalam perdagangan dan investasi. Dengan populasi sekitar 222.800.000 jiwa dan tumbuh pada tingkat 1,36%, Indonesia adalah negara keempat terbesar dari segi populasi. Dengan partisipasi angkatan kerja 107.200.000, Indonesia menyediakan

²⁶ [http://www.hayatulislam.net/Politik%20Luar%20Negeri%20\(LN\)%20Amerika%20Mutakhir](http://www.hayatulislam.net/Politik%20Luar%20Negeri%20(LN)%20Amerika%20Mutakhir) diakses pada 18 Februari 2010

jumlah yang besar akan tenaga kerja untuk produksi barang dan layanan. Selain itu, Indonesia saat ini mengalokasikan 17,2 % dari total pengeluaran publik untuk pendidikan. Hal ini pulalah yang membuat kerjasama Indonesia-Amerika Serikat sangat erat. Sejalan dengan reformasi sistem politik, Indonesia semakin berjalan ke depan untuk program pembangunan ekonomi nasional, dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja dan membuat pasar lebih efisien.

Program pertumbuhan ekonomi negara dengan target sebesar 6,6% untuk periode 2004-2009 sudah terpenuhi, Pemerintah Indonesia mempromosikan investasi dari negara maupun swasta termasuk investasi asing. Selama periode lima tahun tersebut Pemerintah telah berkomitmen US\$ 68.430.000.000 atau 17% dari total investasi yang dibutuhkan. Pada umumnya, hubungan Indonesia-Amerika Serikat telah berlangsung positif dan stabil, namun masih tetap penuh dengan kejutan-kejutan. Perdagangan bilateral meningkat dari tahun ke tahun nilai perdagangan kedua negara dalam tahun 2008 mencapai US\$ 21,7 milyar, 17% lebih tinggi dari total nilai perdagangan tahun 2007 yang mencapai US\$ 18,5 milyar. Berikut ini adalah perbandingan volume perdagangan AS dengan negara-negara ASEAN. Baik dalam volume Ekspor-Impor angkutan laut maupun Ekspor Impor angkutan udara yang dikutip dari Laporan Operasional Tahun 2003 KBRI Washington:

Tabel 2.1

Volume muatan Ekspor-Impor angkutan laut Amerika Serikat dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2003 (dalam metric ton)

Lintas Pelayaran	2003		
	<i>Ekspor(X)</i>	<i>Import (M)</i>	<u><i>Total(X+M)</i></u>
Brunei	5.126	992.445	997.571
Burma	2.264	52.802	55.066

Cambodia	15.217	101.721	116.938
Indonesia	4.157.651	7.069.489	11.227.140
Laos	3.612	860	4.472
Malaysia	1.998.808	4.185.835	6.184.642
Filipina	2.505.847	1.699.016	4.204.862
Singapore	4.590.103	792.617	5.382.720
Thailand	3.703.557	7.259.338	10.962.895
Vietnam	426.862	2.027.620	2.454.482
Total Asean	17.409.047	24.181.742	41.590.789
Total AmerikaSerikat keseluruh dunia	323.632.509	885.318.806	1.208.951.315

Sumber: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Foreign Trade Division. Data diolah Bidang Perhubungan, KBRI Washington, DC

Tabel 2.2

Volume muatan Ekspor-Impor angkutan Udara Amerika Serikat dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2003 (dalam metric ton)

Lintas Penerbangan	2003		
	<i>Ekspor(X)</i>	<i>Import (M)</i>	<i>Total(X+M)</i>
Brunei	312.330	1.486.360	1.798.690
Burma	20.662	2.793.168	2.814.829
Cambodia	254.600	7.593.544	7.848.144
Indonesia	8.717.852	33.171.658	41.889.510
Laos	28.703	36.584	65.287
Malaysia	34.628.794	98.436.860	133.065.654
Filipina	13.743.858	44.136.222	57.880.080

Singapore	79.188.493	61.596.322	140.784.815
Thailand	24.130.816	56.244.066	80.374.882
Vietnam	9.654.764	34.702608	44.417.372
Total Asean	170.680.872	340.258.391	510.939.263
Total Amerika Serikat ke seluruh dunia	2.372.290.201	3.493.063.409	5.865.353.610

Sumber: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Foreign Trade Division. Data diolah Bidang Perhubungan, KBRI Washington, DC

Tabel 2.3
Data Perdagangan Barang Amerika Serikat dengan Indonesia

Tahun	Ekspor	Impor	Saldo
2001	2,520.5	10,103.5	-7,583.0
2002	2,555.8	9,643.4	-7,087.6
2003	2,516.4	9,515.1	-6,998.7
2004	2,671.4	10,810.5	-8,139.1
2005	3,053.9	12,014.3	-8,960.4
2006	3,078.5	13,424.7	-10,346.2
2007	3,969.7	14,301.3	-10,331.6
2008	5,644.5	15,799.1	-10,154.7

Catatan: Semua angka dalam jutaan dolar AS secara nominal, tidak musiman disesuaikan kecuali dinyatakan khusus Detail mungkin tidak sama total karena pembulatan²⁷

2. Kerjasama di Bidang Politik

Nilai-nilai bersama pada demokrasi telah menjadi salah satu aspek yang paling penting dari hubungan politik Indonesia-AS. Masyarakat Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan negara yang akuntabel, representative, toleran, dan transparan.

²⁷ www.census.gov/foreign-trade/balance/c5600.html akses tanggal.18 Februari 2013

Dalam hal ini Indonesia telah menemukan mitra yang kuat di AS. Dengan lebih kurang 300 juta dan 240 juta warga masing-masing, AS dan Indonesia hari ini, negara kedua dan negara ketiga terbesar dalam demokrasi, hubungan bilateral baik pemerintah dan non-pemerintah semakin hari semakin meningkat.

Pada tingkat pemerintah AS ditangani oleh The U.S. Agency for International Development (USAID), USAID berusaha meningkatkan mesin demokrasi dengan pengembangan sekolah-sekolah, pengadilan, media, analisis legislatif, pemerintah daerah, dan badan pemilihan pemerintah. Pada tingkat non-pemerintah, kerjasama ini terus berlanjut. Daftar ini bahkan lebih panjang, seperti The Asia Foundation, misalnya, bergerak dalam pendidikan dan memerangi korupsi. Institut Republik Internasional membantu partai-partai politik meningkatkan respon mereka melalui polling pendapat. National Democratic Institute adalah fokus pada pemerintah daerah dan ketiganya telah membuat pemberdayaan perempuan menjadi prioritas.

Seperti disimpulkan oleh KBRI Washington DC dalam Laporan Inti tahun 2003 KBRI Washington, hubungan politik bilateral Indonesia-AS berjalan baik dan cukup lancar meskipun terdapat beberapa isu yang menjadi sorotan kedua belah pihak. Di antaranya perkembangan proses hukum insiden tewasnya warga AS di Timika, darurat militer di Aceh, keadaan Freeport dan Papua, penerbangan pesawat tempur Hornet di Indonesia, pernyataan Wakil Presiden Hamzah Haz bahwa Amerika raja teroris, Hambaly (Jamaah Islamiah), Alex Manuputy (Front Kedaulatan Maluku) dan pembekuan sementara hubungan militer. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang kaya akan sumber alamnya dan pasar serta daya beli yang cukup besar, berpenduduk Muslim terbesar di dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, serta keanggotaan pada PBB, Non-Blok, OKI, ASEAN, APEC, D-8 dan G20.

Indonesia memang masih berada dalam catatan buruk di AS terutama dalam masalah pelanggaran HAM, Terorisme dan diskriminasi / penganiayaan kelompok minoritas, namun berdasar keunggulan yang dimiliki Indonesia maka kerjasama Indonesia-AS tetap berjalan. Atas fakta tersebut maka hubungan politik dari perspektif kebijakan luar negeri AS, proyeksinya selama ini hampir sama seperti yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada kunjungannya ke Indonesia Februari 2009 lalu yaitu *"A country with the largest Muslim population, Indonesia is able to harmonize Islam, democracy, modernity and women's empowerment"*.

3. Kerjasama di Bidang Keamanan

Dalam bidang kemanan, Amerika Serikat - Indonesia memiliki kerjasama keamanan yang telah terlihat membaik dari tahun ke tahun, pertukaran dan pelatihan terjadi pada hampir setiap sektor. Di tingkat senior, pejabat-pejabat tinggi dari kedua pemerintah berpartisipasi dalam dialog keamanan reguler. Pada tingkat operasional intelijen Amerika dan intelijen Indonesia, Polisi, serta personel militer terus mengejar teroris bersama-sama. Pada tingkat individu, ahli-ahli Amerika membantu melatih petugas polisi Indonesia dalam menangani anjing dan bidang khusus lainnya.

Sejak September 2001 di Washington, Presiden Megawati dan Presiden Bush telah menyepakati untuk membentuk sebuah dialog keamanan bilateral untuk pertukaran pandangan secara periodik antara perwakilan sipil dan kebijakan pertahanan kedua negara, program ini dikenal dengan *Indonesia-United States Security Dialog (IUSSD)*. Setiap delegasi menekankan serangkaian perkembangan yang menuju normalisasi hubungan militer, termasuk penyediaan Pendanaan Militer Asing (FMF), ekspor lengkap artikel pertahanan ke Indonesia dan *Expanded-International Military Education and Training (E-IMET)*. Dengan program-program

kerjasama keamanan tersebut, Indonesia dipercaya memiliki *Indonesian Peacekeeping Forces* yang berada dibawah panji PBB, *the ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, *Defense Resource Management Improvement* dan masuk pada *Global Peace Operations Initiative (GPOI)* dari PBB.

Serangan 11 September 2001 merupakan pukulan besar bagi Amerika Serikat, sebagai negara Super Power, dengan mudahnya ditembus sistem keamanannya oleh sekelompok orang yang disebut sebagai teroris. Serangan tersebut menyebabkan runtuhnya gedung kembar WTC yang merupakan lambang perekonomian Amerika Serikat. George W. Bush dengan segera melakukan manuver terhadap politik luar negerinya. *War on Terror* yang dideklarasikan George W. Bush setelah peristiwa 09/11 2001, bertujuan untuk melindungi bangsa Amerika Serikat dari ancaman teroris.²⁸ Dengan alasan tersebut pula Amerika Serikat menyerang Irak dan menduduki Afghanistan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu menjadi ancaman tersendiri terhadap Amerika Serikat. Kebangkitan Islam sangat berpotensi terjadi di Indonesia, tentu saja ini membuat Amerika waspada.²⁹ Oleh para pembuat kebijakan Bush, Indonesia dianggap sebagai negara sentral untuk memerangi teroris. Maraknya kemiskinan dan ketidakstabilan politik, dianggap sebagai pemicu tumbuhnya sel-sel teroris Al-Qaeda di Indonesia. Bali sudah menjadi tempat pemboman yang menargetkan wisatawan asing yang kemudian ditetapkan pelakunya adalah Jamaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Pengeboman pada

²⁸ Dina Y. Sulaiman, *Perang Irak vs Realisme*, dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1102&type=4, diakses pada tanggal 16 maret 2010

²⁹ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=710&type=2, diakses pada tanggal 16 Maret 2010

tahun 2002 menewaskan 202 orang, sementara Oktober 2005 serangan bunuh diri ini menewaskan sedikitnya 19 orang.³⁰

Kepentingan Amerika Serikat untuk memerangi teroris di Indonesia diawali dengan kebijakan Amerika Serikat mencabut embargo peralatan militer terhadap Indonesia pada tahun 2000. Seperti telah diketahui Indonesia mendapatkan embargo peralatan militer karena berkaitan dengan masalah pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur. Tidak hanya mendapatkan embargo peralatan militer, program IMET yang telah lama berjalan juga dibekukan.

Kepala Staf Komando Perairan Pasifik, Admiral Thomas Boulton Fargo bertemu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djailil dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada 15 Agustus 2002. Dalam kunjungan singkatnya, Fargo mendiskusikan realisasi kerja sama militer dalam bentuk pelatihan bagi personel TNI dan militer Amerika. Kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memerangi terorisme tersebut ditujukan bagi dua level kemiliteran. Pertama, pelatihan bagi personel dengan pangkat letnan kolonel dan kolonel. Kedua, pelatihan untuk tingkatan perwira pertama TNI. Untuk kedua jenis beasiswa anti teroris regional itu, Amerika menyediakan dana sebesar US\$ 4 juta. Dana tersebut akan dikelola oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap anggota TNI yang akan mengikuti pendidikan.³¹

Di tahun 2004, Indonesia diperbolehkan membeli suku cadang pesawat Hercules c-130 agar Indonesia dapat membawa bantuan kepada korban bencana tsunami di Aceh. Pada tahun 2005, Amerika mengaktifkan *International Military*

³⁰ <http://www.cfr.org/publications/8964/>, diakses pada tanggal 19 maret 2010

³¹ <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AgMGBvNSAOA>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010

Education and Training Program (IMET). Indonesia menerima dana IMET sebesar US\$ 600.000. dan pada tahun 2006 Bush meminta kongres untuk menikkan dana sebesar US\$ 800.000. Indonesia juga mendapatkan dana sebesar US\$ 6 juta dari program *Foreign Military Fund (FMF)* untuk keamanan maritim angkatan laut.³²

Pada tahun 2006, Indonesia juga menerima bantuan antiterorisme. Program yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika ini, menghabiskan dana sebesar US\$ 6 juta untuk melatih dan melengkapi unit khusus polisi antiteror, Datasemen Khusus 88 (densus 88). Program Densus 88 sudah dilaksanakan pada tahun 2003 sebagai tanggapan Bom Bali, dan sudah menerima dana US\$ 14,8 Juta.³³

Dari tahun 2001-2004, pemerintah Amerika Serikat juga telah memberikan dana bantuan ekonomi sebesar US\$ 23,2 juta yang digunakan untuk membenahi kepolisian negara dan militer.³⁴ Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Indonesia sebagai mitra dalam memberantas terorisme. William W. Paul, menyatakan dalam kongres bahwa Datasemen 88 telah berhasil menangkap pelaku dibalik serangan bom di kedutaan Australia dan tiga orang teroris yang berencana akan melakukan pegeboman di salahsatu pusat perbelanjaan.³⁵ Kebijakan *War on Terror* Bush merupakan bagian dari kepentingan George W. Bush untuk memerangi teroris. Munculnya kepentingan ini untuk menutupi lemahnya keamanan dan militer Amerika Serikat yang berhasil ditembus pada serangan 11 September 2001. Dengan kebijakan ini, George W. Bush ingin membuktikan bahwa keamanan dan militer Amerika Serikat tidak lemah.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

BAB III

HUBUNGAN KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA MASA PEMERINTAHAN BARACK HUSEIN OBAMA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih dipengaruhi oleh faktor domestik daripada faktor internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan hasil perumusan atas tarik menarik kepentingan antar aktor di dalam pemerintahannya dengan didasarkan atas nilai-nilai utama (core values) yang dianut oleh rakyat Amerika Serikat.³⁶ Aktor dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Aktor formal terdiri dari Presiden, Kongres dan staf kepresidenan, sedangkan aktor informal terdiri dari media massa dan kelompok kepentingan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dirumuskan atas nilai-nilai utama (core values) berupa nilai-nilai demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai persamaan (egalitarian values) dan individualistik. Nilai-nilai utama inilah yang menjadi fondasi bagi rumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Masalah-masalah pelanggaran HAM inilah yang apabila dianalisis melalui pengimplemtasian nilai-nilai utama Amerika Serikat, menjadikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat represif di Afganistan. Akan tetapi alasan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi represif di wilayah ini adalah sebagai upaya dalam memerangi terorisme pasca peristiwa 11 September 2001. Namun Presiden Husein Obama berusaha mendorong proses perdamaian di negara ini dengan cara-cara diplomasi multilateral, bukan dengan mengedepankan kekuatan militer.³⁷

³⁶ <http://majalah.moestopo.ac.id/?tag=kebijakan-luar-negeri>, diakses pada tanggal 3 Maret 2010

³⁷ *Ibid.*